

STUDI IMPLEMENTASI PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)

Oleh : *Nina Widowati*

Abstract : *Urban Poverty Project (P2KP) as one of government projects with the aim of reconciling the poverty. The object of Urban Poverty Project as the poor society in urban area under the approved criterion. The objective of Urban Poverty Project as to give revolving fund to the target groups. The implementation of urban poverty project in Kedungmundu subur is not distributed on proportion. Under the assumption, it possibly had some bearing on communication and awareness phenomena. The result of the the research showed that the attainment of implementation of urban poverty project as influenced a lot by the society's awareness that doesn't support the execution as the procedure to develop the self-reliance society groups is not simple.*

Keywords : *police implementation, communication and society's awareness*



Pendahuluan

Kemiskinan bukan masalah yang baru untuk kita. Masalah kemiskinan di Indonesia saat ini sangat mendesak untuk ditangani. Salah satu ciri umum dari kondisi masyarakat yang miskin di perkotaan adalah minimnya sarana dasar perumahan atau pemukiman yang memadai dan kualitas lingkungan yang kumuh.

Kemiskinan yang terjadi telah menyadarkan semua pihak bahwa harus ada upaya yang dipilih untuk menanggulangnya. Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat miskin perkotaan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab masyarakat, namun demikian mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok miskin perkotaan ini, maka diperlukan bantuan program melalui pendekatan yang efektif melalui pemberdayaan.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Sasaran P2KP adalah warga masyarakat miskin sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga, yaitu masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang penghasilannya merosot akibat inflasi serta masyarakat yang kehilangan sumber nafkahnya karena krisis ekonomi.

Prinsip yang harus dijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat, konsultan maupun pemerintah) dalam melaksanakan P2KP adalah :

1. Demokrasi, artinya dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama masyarakat miskin, maka mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan demokratis;

Penulis adalah Pengajar Jurusan Administrasi Politik FISIP UNDIP

*Jurnal Ilmu Sosial Vol. 6 No. 1
Pebruari 2007*

2. Partisipasi, dalam setiap langkah kegiatan P2KP harus dilakukan secara partisipatif, sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui bekerja bersama.

3. Transparansi dan Akuntabilitas, dalam proses manajemen proyek maupun manajemen organisasi, masyarakat harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar dan 'melembagakan' sikap bertanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakannya;

4. Desentralisasi, dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaatan masyarakat sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan.

Sasaran P2KP adalah warga masyarakat miskin perkotaan, sesuai dengan rumusan kriteria kemiskinan setempat yang disepakati oleh warga, termasuk di dalamnya adalah masyarakat yang telah lama miskin, masyarakat yang penghasilannya merosot akibat inflasi serta masyarakat yang kehilangan sumber nafkahnya karena krisis ekonomi.

P2KP membantu mengembangkan sumber daya masyarakat dengan cara meningkatkan keberdayaan institusi masyarakat di tingkat lokal, termasuk institusi yang dibangun serta dikembangkan yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM merupakan sekumpulan warga kelurahan sasaran yang memenuhi kriteria warga miskin yang ditetapkan masyarakat sendiri untuk mengatasi permasalahan pokok, baik yang menyangkut prasarana dasar lingkungan, peningkatan pengetahuan serta ketrampilan maupun masalah-masalah pengembangan modal bagi anggota KSM. Sebagai instrument pemberdayaan masyarakat, maka proses pembentukan KSM hendaknya benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah pendekatan dari bawah (*bottom-up approach*), tanpa banyak dipengaruhi iming-iming atau motivasi adanya 'dana' terlebih dulu.

Tujuan dari P2KP adalah memberi bantuan untuk membiayai kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat di Kelurahan melalui :

1. Bantuan modal kerja bergulir (pinjaman) bagi upaya peningkatan pendapatan secara berkelanjutan
2. Hibah bagi pengembangan perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan

Pinjaman. Pinjaman untuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang membutuhkan dana untuk usaha produktif termasuk kredit mikro perumahan atau perbaikan rumah dan atau pelatihan ketrampilan yang langsung terkait dengan kegiatan usaha tertentu

Batas maksimal pinjaman pertama bagi setiap anggota KSM adalah Rp 500.000,00, sedangkan batas maksimal pinjaman untuk tahap berikutnya adalah Rp 2 juta.

Hibah. Yaitu hibah yang dipergunakan untuk kegiatan yang benar-benar mendesak dan bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat miskin, seperti jalan lingkungan, jalan setapak, saluran air, MCK, jembatan penghubung, fasilitas sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain yang diidentifikasi terlebih dulu melalui Rencana Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis)

Selain itu juga hibah untuk santunan fakir miskin, orang jompo, yatim piatu, dan lain-lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka

Dalam pelaksanaan P2KP, pemerintah kota Semarang bekerjasama dengan organisasi masyarakat yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Diharapkan keberadaan BKM dapat mewakili kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan mengakomodasikan ke seluruh wilayah kelurahan sasaran P2KP.

BKM Tunas Jaya merupakan BKM yang terbentuk di Kelurahan Kedungmundu dengan Akte Notaris Nomor 20 tanggal 20 Agustus tahun 2003. P2KP Kelurahan Kedungmundu merupakan proyek tahap II dengan modal Rp 100.000.000,00. Dari modal tersebut Rp 5.000.000,00 diperuntukkan dana operasional, sedangkan Rp 9.000.000,00 diantaranya melalui kesepakatan pengurus dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu:

- o Rp 3.000.000,00 diperuntukkan beasiswa SD - SMA (@ Rp 50.000,00),
 - o Rp 3.000.000,00 untuk bantuan bazar di Kelurahan Kedungmundu
 - o Rp 3.000.000,00 untuk bantuan panti wreda di Dukuh Ampo Kelurahan Kedungmundu.
- Rp 10.000.000 lainnya diperuntukkan pembangunan pengaspalan fisik jalan dan sisanya (Rp 76.000.000,00) diputar untuk masyarakat yang membutuhkan dengan beberapa persyaratan tertentu.

Kelurahan Kedungmundu mempunyai wilayah yang cukup luas, yaitu terdiri 8 RW dengan sosial ekonomi yang tidak sama. Jumlah KSM yang terbentuk ada 37 yang terdistribusi di semua wilayah RW kecuali RW 07. RW 01 terdiri dari 2 KSM, RW 02 terdiri dari 4 KSM, RW 03 terdiri dari 15 KSM, RW 04 terdiri dari 6 KSM, RW 05 terdiri dari 3 KSM, RW 06 terdiri dari 6 KSM DAN RW 08 terdiri dari 8 KSM. Tidak adanya KSM di RW 7 dikarenakan RW tersebut merupakan wilayah baru sebagai bagian dari RW 8 yang dibagi menjadi dua wilayah, di samping itu juga merupakan kompleks perumahan baru yang terdiri dari masyarakat yang dapat digolongkan cukup mampu.

Karena terbentuknya KSM di tiap-tiap RW tidak merata, maka distribusi penyaluran dana pinjamanpun tidak merata pula. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap implementasi program P2KP di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Agar pembentukan KSM yang berkualitas terwujud, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan diperhatikan adalah :

1. Tersosialisasikannya konsep P2KP kepada masyarakat secara benar
2. Tersosialisasikannya konsep KSM kepada elite kelurahan secara benar
3. Tersosialisasikannya ide pembentukan KSM kepada warga masyarakat secara benar dan terdaftarnya calon anggota KSM
4. Terbentuknya KSM secara difinitif serta rencana kegiatan awal secara sederhana

Keadaan yang terjadi di Kelurahan Kedungmundu Semarang diduga karena adanya komunikasi yang kurang baik antara pengelola P2KP dengan masyarakat, disamping sikap masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam program P2KP.

Seperti yang dikatakan oleh Daniel A Mazmanian dan Paul A Sabatier, bahwa ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu (1) Karakteristik dari masalah; (2) Karakteristik kebijakan/undang-undang; (3) Variabel lingkungan (Subarsono, 2005 : 94)

1. Karakteristik dari masalah, yang terdiri dari :
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
2. Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang, yang terdiri dari :
 - a. Kejelasan isi kebijakan
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis

- c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - e. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - g. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi
3. Lingkungan Kebijakan, yang terdiri dari :
- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - c. Sikap dari kelompok pemilih
 - d. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor

Adapun George Edwards III (Subarsono, 2005 : 90) menjelaskan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu : komunikasi, sumber-sumber daya, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Sedangkan Grindle menyebutkan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu konten dan konteks kebijakan. Konten atau isi kebijakan merupakan apa yang ada di dalam kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses kebijakan publik tersebut (Wibawa, 1994 : 24)

Dalam penelitian ini akan dikaji fenomena komunikasi (dari teori George Edwards III) dan fenomena sikap (dari teori Mazmanian dan Sabatier) yang diturunkan menjadi fenomena kesadaran masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan program P2KP.

Di samping itu ada beberapa kondisi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

1. Ada tidaknya keterbatasan-keterbatasan eksternal yang parah, maksudnya jika terdapat penolakan yang besar dari kalangan eksternal organisasi publik, maka jelas implementasi kebijakan akan gagal.
2. Ketersediaan waktu dan sumberdaya yang cukup. Jika implementasi kebijakan tidak didukung dengan waktu dan sumber daya yang cukup, maka implementasi tidak akan sukses
3. Adanya pembagian kerja yang jelas pada setiap tahapan implementasi, sehingga menghasilkan kejelasan hak dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga tersebut
4. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang baik antar lembaga pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi
5. Kepatuhan terhadap kesepakatan dan tujuan yang telah ditetapkan dalam koordinasi implementasi tersebut berpengaruh positif terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Ini berkaitan dengan konsistensi dan komitmen antara apa yang ditulis dengan apa yang dilaksanakan dalam tahapan implementasi.

Dari keadaan seperti yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi P2KP di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Semarang dan apakah komunikasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap implementasi P2KP.

Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui implementasi Program P2KP di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Semarang ; (2) Untuk mengetahui komunikasi antara masyarakat dan pengelola P2KP di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Semarang dan (3) Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap program P2KP di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Semarang.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan implementasi Program P2KP serta fenomena yang mempengaruhi kurang berhasilnya Program P2KP yang dilaksanakan di Kelurahan Kedungmundu Kecamatan Tembalang Semarang.

Dalam penelitian ini yang merupakan sumber informasi adalah individu-individu yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Kedungmundu Semarang.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dengan semua KSM yang ada di Kelurahan Kedungmundu Semarang.

Adapun lokasi penelitian adalah di Kelurahan Kedungmundu Semarang, dengan teknik analisis kualitatif dalam mengkaji implementasi Program P2KP di Kelurahan Kedungmundu Semarang.

Hasil Penelitian

1. Implementasi

Implementasi program merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan program pemerintah demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan melalui kesepakatan bersama dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia serta melibatkan masyarakat yang menjadi target sasaran program.

Keberhasilan implementasi program P2KP salah satunya ditentukan dari bagaimana pelaksanaan program tersebut di lapangan atau di masyarakat. Banyak fenomena yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tingkat sosialisasi tidak kalah pentingnya bagi keberhasilan suatu program. Dengan sosialisasi yang baik diharapkan tumbuh kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Implementasi Program P2KP di Kelurahan Kedungmundu Semarang diberikan dalam bentuk dana pinjaman bergulir kepada KSM, dimana dana pinjaman tersebut harus digunakan untuk kegiatan ekonomi atau modal usaha anggota KSM. Pengembalian dana pinjaman dilaksanakan dalam 12 bulan dengan bunga 1,5%. Apabila ada KSM yang mengalami keterlambatan pengembalian akan dikenakan denda 1% dari jumlah angsuran. Hal ini untuk menghindari kemacetan dana bergulir pada KSM lain yang hendak meminjam. Dana pinjaman P2KP saat ini sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun, yang dikelola sendiri oleh masyarakat Kelurahan Kedungmundu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tunas Jaya.

Dari ke 37 informan yang diwawancarai, 48,65% tamat SMA; dan 8,11% tamat D3. Namun sebagian diantaranya hanya tamat SMP (24,32%), tamat SD (16,22%) dan mereka yang tidak tamat SD sebanyak 2,70%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar KSM sebenarnya sudah mempunyai tingkat pendidikan yang cukup tinggi, walau masih ada yang berpendidikan yang kurang tinggi. Cukup tingginya tingkat pendidikan kiranya berdampak juga bagi implementasi program P2KP, karena dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa mereka cukup berhasil dengan program ini, walaupun tidak terlalu meningkat usahanya. Kebanyakan dari mereka mempunyai profesi sebagai

pedagang, tukang afdruk foto, bidan, dan tukang bengkel.

Untuk lebih mengetahui kondisi riil di lapangan mengenai Implementasi Program P2KP di Kelurahan Kedungmundu, maka di bawah ini akan disajikan hasil yang didapat di lapangan sebagai hasil wawancara dengan informan.

Terhadap pemahaman masyarakat terhadap P2KP di Kelurahan Kedungmundu dapat dikategorikan kurang baik. Hal ini dibuktikan dengan 54,05% menyatakan kurang mengetahui dan bahkan 2,70% menyatakan tidak mengetahui tentang P2KP. Sosialisasi tentang P2KP secara berulang-ulang di wilayah Kelurahan Kedungmundu memang jarang dilakukan. Padahal seharusnya sosialisasi visi, misi dan tujuan serta strategi P2KP disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kesempatan secara terencana. Sedangkan 37,84% menyatakan sudah mengetahui dan 5,41% sangat mengetahui tentang P2KP di wilayah Kelurahan Kedungmundu. Mereka yang mengetahui kebanyakan berasal dari hasil *gethok tular* warga yang telah mengetahui terlebih dulu. Dengan adanya informasi yang datang dari tetangga, maka bagi masyarakat yang mempunyai usaha berupaya untuk mengetahui persyaratan pembentukan KSM sampai dengan pengajuan proposal pinjaman.

Bantuan tahap dua yang pernah mereka terimapun tidak sama dari ke 37 KSM yang terbentuk. 45,95% menyatakan baru menerima dua kali, 13,51% bahkan baru satu kali menerima bantuan. Bantuan yang diterima sifatnya bukan otomatis digulirkan lagi begitu angsuran lunas, tapi harus melalui pengajuan proposal seperti pengajuan pertama. Tim BKM akan mengadakan evaluasi KSM mana yang layak mendapatkan dan mana yang tidak berdasarkan kepentingan penggunaan dan ketepatan dalam melakukan pengangsuran pada pinjaman pertama.. Pemberian bantuan dana bukannya tanpa kendala, kendalanya adalah jumlah dana yang terbatas. Sedangkan 40,54% KSM menyatakan telah tiga kali atau lebih menerima bantuan. Pada umumnya mereka adalah KSM yang telah terlebih dulu terbentuk serta mempunyai catatan baik dalam melakukan pengangsuran. Dana yang digulirkan untuk pinjaman kedua bisa naik. Kalau pada pinjaman pertama hanya sebesar Rp 500.000,00, maka pada pinjaman kedua dan seterusnya bisa naik sampai dengan 2 juta per anggota KSM, tergantung dana yang tersedia.

Terhadap kecukupan dana bantuan untuk penambahan modal usaha, 59,46% menyatakan cukup untuk tambahan modal. Mereka menyatakan cukup karena usaha tergolong pedagang kecil, seperti pedagang sayur, pedagang gorengan, pedagang jamu maupun pemilik warung nasi. Sedang sisanya menyatakan bahwa bantuan yang diberikan merasa kurang cukup. Mereka pada umumnya adalah pedagang yang mempunyai usaha agak besar, seperti pemilik toko kelontong, pedagang minyak tanah, pengelola wartel juga pengelola bengkel.

Kemanfaatan bantuan untuk tambahan modal usaha, semuanya menyatakan bermanfaat. Adanya tambahan dana menjadikan jenis usaha mereka bisa sedikit berkembang. Dengan berkembang usahanya tersebut, secara otomatis keuntungan yang didapat juga bertambah besar. Hal ini menjadikan mereka merasa terbantu dengan adanya program P2KP di wilayah Kelurahan Kedungmundu Semarang.

Dalam pengembalian dana pinjaman P2KP antara satu KSM dengan KSM yang lain tidak sama. 62,16% KSM menyatakan seringkali tepat waktu sedangkan sisanya kurang tepat waktu, bahkan tidak pernah tepat waktu. Kurang disiplinnya mereka membayar angsuran dikarenakan modal mereka seringkali menjadi satu dengan uang keseharian mereka. Modal usaha bahkan sering juga dipakai untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Untuk itu mereka sering merasa kesulitan membayar tepat waktu. Mereka tetap mengangsur, tetapi tidak tepat waktu jatuh tempo.

Kenaikan penghasilan bagi KSM dapat dikategorikan baik. Hal ini

dibuktikan dengan seluruh KSM yang menyatakan penghasilannya meningkat dengan adanya program P2KP ini, walaupun tidak terlalu banyak. Mereka sangat berharap untuk lebih diberi kemudahan dalam peminjaman selanjutnya.

Komunikasi. Komunikasi yang efektif bukan saja mempengaruhi kelancaran tugas-tugas dalam implementasi, tapi juga akan mempermudah masuknya informasi, ide dan gagasan bagi masyarakat. Komunikasi efektif dapat tercapai jika terdapat kejelasan dan integritas yang disampaikan serta penggunaan strategi dan sarana organisasi yang tepat. Tanpa memperhatikan hal tersebut maka kebijakan atau informasi dari pemerintah tidak akan sampai pada masyarakat. Komunikasi sangat menentukan terhadap keberhasilan program P2KP, karena tanpa adanya komunikasi yang baik maka program pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam program P2KP kurang optimal.

Fenomena komunikasi sangat menentukan terhadap keberhasilan implementasi program P2KP, karena hanya dengan sosialisasi yang baik maka program dapat dikenal oleh masyarakat. Adanya komunikasi yang baik juga bermanfaat menampung ide, gagasan serta uneg-uneg dari masyarakat. Dari wawancara diperoleh informasi bahwa paparan tentang program P2KP didistribusikan ke seluruh masyarakat di wilayah RW masing-masing melalui pertemuan-pertemuan formal.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar dari mereka mendapat informasi tentang P2KP secara lengkap dari kader masyarakat (67,57%), selain mengetahui dari saudara, tetangga maupun media massa. Karena matapencarian masyarakat yang bersifat heterogen, maka agak kesulitan mengumpulkan mereka dalam satu pertemuan. Untuk itu informasi selain diberikan pada saat ada pertemuan rutin (arisan), juga melalui pertemuan informal. Walaupun mereka sibuk berdagang, namun mereka menyempatkan hadir dalam setiap sosialisasi yang diadakan di lingkungannya. (67,57%) menyatakan pernah hadir lebih dari dua kali pertemuan dalam sosialisasi P2KP, sedangkan sisanya hanya pernah datang sekali dalam pertemuan tersebut. Informasi P2KP bersifat terbuka, artinya siapa saja boleh mendengarkan dan mengetahui, terutama adalah mereka yang mempunyai bidang usaha tertentu. Namun pada kenyataannya, tidak semua warga ingin tahu.

Tingkat pemahaman terhadap informasi tentang P2KP yang disampaikan pada masyarakat ternyata tidak sama. Walaupun sebagian besar (86,49%) sudah paham, namun masih ada 13,51% yang kurang paham atas sosialisasi tentang P2KP yang disampaikan oleh petugas dari Kelurahan. Kurang pemahamannya mereka kebanyakan berasal dari mereka yang mempunyai tingkat pendidikan rendah selain juga mereka yang tidak mengikuti penjelasan dari awal. Karena sebagian besar bermatapencarian berdagang, maka kalau harus meluangkan waktu secara formal mendengarkan petugas mereka merasa keberatan. Bagi mereka waktu adalah uang, sehingga mereka sering menggantungkan pada rekan-rekannya yang datang untuk bertanya tentang apa yang mereka kurang tahu.

Untuk tingkat kejelasan petugas dalam menyampaikan informasi sudah dapat dikategorikan baik, dimana 83,79% sudah merasa jelas terhadap apa yang disampaikan. Sisanya ((16,21%) merasa kurang jelas. Kurang jelasnya mereka dikarenakan tidak dari awal mendengarkan, di samping mereka juga takut untuk mengajukan pertanyaan pada aparat. Mereka merasa sungkan, takut serta malu. Mereka lebih berani bertanya di luar pertemuan, terutama bertanya dengan sesama teman yang terlebih dulu masuk dalam KSM.

Dalam hal intensitas pertanyaan yang diajukan pada petugas P2KP Kelurahan Kedungmundu dapat dikategorikan kurang baik, karena sebagian besar (68,46%) kurang berperan serta dalam mengajukan

pertanyaan sehubungan dengan P2KP. Hal ini merupakan hal yang biasa dalam setiap pertemuan, bahwa tidak semua peserta mau mengajukan pertanyaan pada petugas lapangan. Mereka yang seringkali mengajukan pertanyaan ada sekitar 27,03%, sedangkan sisanya (13,51%) selalu mengajukan pertanyaan setiap pertemuan. Hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian dari pengelola program agar mereka mau bertanya apabila ada hal-hal yang kurang diketahuinya.

Bahasa yang dipergunakan dalam mengadakan sosialisasi adalah bahasa Indonesia, namun dari hasil penelitian diperoleh masukan bahwa sebenarnya mereka menginginkan bahasa yang bersifat campuran Indonesia dan Jawa. Selain itu bahasa yang diinginkan adalah bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh mereka sehari-hari.

Dari fenomena komunikasi yang terjadi di lapangan antara petugas dari Kelurahan dan masyarakat dapat dikatakan tidak terjadi kendala yang berarti. Komunikasi antara keduanya berjalan baik, hanya saja waktu untuk memberikan sosialisasi perlu disinkronkan dengan karakter masyarakat yang kebanyakan adalah masyarakat menengah ke bawah yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang kecil.

Tingkat Kesadaran Masyarakat. Tingkat kesadaran masyarakat merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dengan mengikutsertakan masyarakat dalam program P2KP, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. P2KP juga merupakan sarana untuk mengubah masyarakat dalam hal pola pikir, perilaku dan pada akhirnya merubah tingkat sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Kedungmundu. Kesadaran masyarakat merupakan fenomena yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu program seperti P2KP. Suatu kebijakan, betapapun telah dirumuskan dengan baik, didukung seperangkat hukum atau pelaksana serta peraturan-peraturan yang kuat, namun jika tidak ada kesadaran masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut, maka hasilnya akan sia-sia. Dalam mengukur tingkat kesadaran masyarakat, terdapat tiga komponen pokok, yaitu pengetahuan, persepsi dan perilaku. Pengetahuan tentang pentingnya program P2KP untuk masyarakat kurang mampu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Persepsi positif tentang P2KP sehingga masyarakat mau bergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) serta perilaku yang meliputi sikap dan tindakan yang dilakukan masyarakat anggota KSM untuk melaksanakan program P2KP.

Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa tingkat dukungan masyarakat terhadap Program P2KP positif, karena semua menyatakan mendukung program tersebut. Mereka menyatakan demikian setelah mereka bergabung dalam KSM dan mendapatkan hasil dari perantara mereka dalam KSM tersebut. Hanya saja mereka ternyata kurang mengetahui (67,57%) persyaratan dan peraturan pembentukan KSM dengan baik KSM merupakan kumpulan orang yang menyatukan diri dalam kelompok yang bergerak di bidang ekonomi, yang tumbuh dan berkembang dari, oleh dan untuk kepentingan para anggota dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Hal yang perlu dipertimbangkan pada waktu proses pembentukan KSM P2KP antara lain adalah : (1) Sosialisasi visi, misi dan tujuan serta strategi P2KP secara terencana kepada tokoh dan masyarakat kelurahan sasaran program; (2) Sosialisasi ide, gagasan dan konsep KSM; (3) Penjaringan calon anggota KSM yang sesuai kriteria P2KP; (4) Pembentukan KSM secara difinitif; (5) Rencana kegiatan awal KSM secara sederhana; (6) menonjolkan partisipasi aktif masyarakat.

Karena tidak mudah pembentukan KSM tersebut, mereka bahkan menyatakan bahwa aturan yang dibuat untuk pembentukan KSM sulit dan berbelit-belit. Akibatnya sebagian besar (67,57%) kurang mengetahui

persyaratan dan pelaksanaan program P2KP. Kalaupun saat ini mereka sudah mendapatkan pinjaman dana, itu karena mereka mengikuti ketua KSM yang ditunjuk. Pembuatan proposal peminjaman biasanya dibuat oleh ketua KSM. Bagi mereka yang penting guliran dana bisa segera cair dan dapat segera mereka pergunakan untuk menambah modal.

Terhadap prosedur peminjaman yang memberatkan mereka, sebagian besar (70,27%) mereka kurang setuju dan dianggap kurang praktis. Perlu diketahui bahwa untuk membentuk sebuah KSM paling sedikit harus mempunyai tiga anggota. Untuk mencari tiga anggota saja bukan merupakan hal yang mudah. Di samping itu usaha yang dimiliki harus usaha yang kongkrit, bukan berupa jasa. Perlu diketahui bahwa pengguliran dana ini dimaksudkan untuk memberikan dan mengembangkan modal usaha.

Adanya prosedur yang harus dilalui ternyata kurang membuat mereka berpartisipasi aktif dalam mencari tahu tentang prosedur dalam pembentukan KSM dan pencairan dana. Ini dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa sebagian besar (59,46%) kurang mau berusaha mencari tahu prosedur dan pelaksanaan program P2KP. Walaupun demikian, kehendak untuk membentuk KSM cukup tinggi, yaitu sebesar 64,86%. Tidak hanya itu, mereka juga antusias untuk mengembangkan usahanya dari tambahan modal tersebut.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa tingkat kesediaan hadir dalam pertemuan P2KP dapat dikategorikan tinggi (100%), namun untuk tetap berpartisipasi mengikuti penyuluhan program P2KP sampai dengan selesai dapat dikategorikan kurang tinggi (72,98%). Mereka merasa tidak nyaman duduk berlama-lama di dalam suatu ruangan, dikarenakan mereka harus bekerja mencari uang untuk keluarga. Untuk itu seringkali mereka mengikuti penyuluhan, tetapi tidak sampai selesai. Partisipasi mereka juga tinggi dalam upaya merubah nasib menjadi lebih baik. Seluruh anggota KSM merasa bertanggung jawab terhadap guliran dana yang mereka terima dan berusaha mengelola dengan baik.

Dari tingkat partisipasi masyarakat terhadap program P2KP dapat dikategorikan kurang baik, karena masih terdapat hal-hal yang kurang mendukung dalam program pelaksanaan P2KP.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi keberhasilan program P2KP ditentukan oleh komunikasi antara petugas kelurahan dengan masyarakat. Kondisi di lapangan yang terjadi adalah masyarakat seringkali kurang mengetahui adanya suatu program tertentu tanpa adanya sosialisasi program kepada masyarakat. Demikian juga program P2KP tahap dua ini. Komunikasi bukan saja harus dengan cara mengadakan pertemuan antara petugas kelurahan dengan masyarakat secara formal, namun juga dapat melalui pertemuan-peremuan informal, misalnya dalam forum pengajian atau arisan. Sosialisasi yang diadakan di kelurahan juga ternyata lebih efektif bila diadakan per wilayah RW dan bukan secara keseluruhan untuk satu kelurahan. Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa Kelurahan Kedungmundu mempunyai wilayah yang cukup besar, yaitu terdiri dari delapan RW. Sosialisasi yang diadakan pada tiap-tiap RW ternyata lebih mengena dan dapat lebih dipahami masyarakat dibanding dengan sosialisasi yang sifatnya perwakilan RW. Petugas kelurahan mengundang wakil tiap-tiap RT dan tokoh masyarakat untuk diberi penjelasan tentang program P2KP, untuk selanjutnya akan disosialisasikan kepada warga masing-masing RT setempat. Di Kelurahan Kedungmundu status sosial ekonomi tiap RW juga tidak sama, maka waktu untuk bertemu harus menyesuaikan penduduk

Pembahasan

setempat. Perlu diketahui bahwa sebagian dari wilayah penduduk kelurahan Kedungmundu terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang atau warga pemilik perumahan yang dibangun oleh developer. Bagi penduduk perumahan, sebagian besar berprofesi sebagai pegawai, baik negeri maupun swasta; sedangkan penduduk asli kebanyakan adalah berprofesi sebagai pedagang, buruh dan tukang. Sehubungan dengan itu, agar dapat duduk bersama untuk sebuah sosialisasi harus dibantu oleh kader masyarakat setempat untuk memberikan penjelasan pada masyarakat tentang program dengan waktu yang telah disepakati.

Kesadaran masyarakat merupakan fenomena yang juga menentukan keberhasilan implementasi P2KP Kelurahan Kedungmundu Semarang. Karena tingkat sosial ekonomi yang sifatnya heterogen, maka diperlukan pendekatan tertentu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kedungmundu. Walaupun hasil dari wawancara menunjukkan hasil yang kurang positif, namun sebenarnya masyarakat mendukung terhadap program P2KP ini. Pada saat ini KSM yang terbentuk memang belum optimal, untuk itu masyarakat perlu lebih diberdayakan agar mau membentuk KSM. Warga yang tergolong miskin ternyata belum semuanya bergabung dalam KSM. Mereka masih banyak yang belum tahu persyaratan pembentukan KSM. Sehubungan dengan itu maka perlu adanya petugas atau kader masyarakat yang memberi penjelasan pada masyarakat tentang program, tujuan dan manfaat P2KP. Dengan mengetahui manfaat yang akan diperoleh, maka masyarakat diharapkan akan lebih antusias untuk mendukung program. Selama ini masyarakat banyak yang bersikap pasif terhadap program yang sifatnya pengaliran dana. Kebanyakan dari mereka sudah terlanjur senang dengan program yang sifatnya simpel, tidak berbelit-belit dan mudah didapat, seperti program raskin. Untuk itu perlu dijelaskan program P2KP dengan kata-kata dan bahasa yang sederhana agar lebih dimengerti dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk berperanserta.

Penutup

Kesimpulan. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di perkotaan yang bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraannya.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin perkotaan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab masyarakat. Untuk itu diperlukan pemberdayaan masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Kelurahan Kedungmundu merupakan salah satu wilayah yang mendapat proyek P2KP tahap II. Dalam implementasinya program ini banyak perangkat yang terlibat seperti fasilitator, kader masyarakat, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) maupun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Pembentukan KSM harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain 2/3 anggota tergolong miskin, ada pertemuan anggota secara rutin minimal satu bulan sekali, pengurus aktif dan fungsional serta mempunyai usaha produktif.

Kelurahan Kedungmundu Tembalang mempunyai 37 KSM yang masih aktif sampai saat ini. Untuk mengetahui implementasi program P2KP maka di bawah ini dapat disajikan hasil dari penelitian sebagai berikut:

a. Implementasi P2KP di Kelurahan Kedungmundu dapat dikatakan cukup berhasil walaupun belum optimal. Banyak warga yang telah bergabung dalam KSM, walaupun tidak merata di masing-masing wilayah RW. Meskipun sebagian besar anggota KSM mendukung pro-

gram ini, namun pemahaman terhadap tujuan dan manfaat Program P2KP kurang dimengerti oleh masyarakat secara luas. Selain itu dalam masalah angsuran masih belum seperti yang diharapkan, karena ada beberapa yang kurang dapat tepat waktu dalam melunasi angsuran.

b. Dalam fenomena komunikasi terhadap program P2KP dapat dikatakan berjalan lancar. Sosialisasi telah dapat diterima oleh masyarakat Kelurahan Kedungmundu, hanya saja masih perlu ditingkatkan keberanian mereka untuk berkomunikasi pada petugas kelurahan maupun kader masyarakat untuk bertanya apabila ada informasi yang belum mereka ketahui.

c. Pada fenomena tingkat kesadaran masyarakat menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Kurang minatnya mereka dalam pembentukan KSM karena prosedur yang tidak mudah, sehingga tidak meratanya jumlah KSM pada setiap RW terjawab dalam fenomena ini. Untuk mencari tiga anggota KSM tidaklah mudah. Padahal salah satu persyaratan pembentukan KSM adalah anggotanya terdiri dari 3 - 10 orang yang bergerak di bidang usaha tertentu.

Saran. Untuk meningkatkan implementasi program P2KP di Kelurahan Kedungmundu, maka penjelasan dan pemahaman suatu proyek harus disosialisasikan dengan baik, tidak saja melalui pertemuan formal (rapat) namun juga dapat melalui pertemuan PKK, pertemuan (arisan) bapak-bapak bahkan dalam kelompok pengajian yang ada di tiap-tiap RT. Upaya pengenalan program dapat dilakukan dengan memanggil tim dari Kelurahan maupun dari BKM. Agar KSM tepat waktu dalam mengangsur, maka ada baiknya diberi stimulus, misalnya dengan mempermudah pinjaman selanjutnya bagi KSM yang tepat waktu mengangsur.

Suasana yang lebih terbuka dalam mengkomunikasikan tentang program P2KP seyogianya dibangun antara aparat dengan masyarakat. Dengan demikian dialog dapat sekaligus menampung uneg-uneg masyarakat yang masih belum paham terhadap program yang disosialisasikan.

Agar tingkat kesadaran masyarakat dalam menerima program lebih baik maka prosedur untuk membentuk KSM dan pengajuan proposal dipermudah. Yang terpenting Ketua KSM dapat memberi cara sederhana dalam menghimpun masyarakat untuk tergabung dalam KSM.



Daftar Rujukan

- AF Stoner, James. (1986). *Manajemen*, Jakarta. Erlangga.
- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh. (2002). *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Semarang. Universitas Diponegoro.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soedrajat. (1984). *Stimulus dan Kesadaran Manusia*, Jakarta. Psikologi Manusia, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publio*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.